

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL DI KELURAHAN GUBUKUSUMA KECAMATAN TIDORE UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN

Ilfan Baharuddin

**Dosen Universitas Nuku, Tidore Kepulauan,
Maluku Utara, Indonesia**

(Naskah diterima: 10 Januari 2018, disetujui: 20 Januari 2018)

Abstract

This study intends to explore and analyze how the implementation of the Poor Empowerment Program through Direct Social Empowerment in Gubukusuma Village, North Tidore Subdistrict Tidore Kepulauan City as one of the strategic business to increase the family's economic income in the survival, the method used in this study is descriptive qualitative, while the main instrument in the field data collection conducted through in-depth interviews, participatory observation and to obtain additional data traced also written reports from the Head of Kelurahan Gubukusuma, Joint Business Group I Kelurahan gubukusuma and Social Service Work and Transmigration of Tidore Islands The islands are concerned with the research focus. Based on the findings of the field show that: First, the existence of obstacles in the implementation of the program such as information delays by the village, the information is less accurate so that there are differences of interpretation from various target groups and socialization of programs that are less intense and maximized on the program development system. Second, the target group/KUBE I acknowledge that they have a lack of experience and information about agriculture that requires competent companions, but the government (Head of Social Affairs) says that they experience a shortage of personnel resources and monitoring funds making it difficult to provide targeted assistance to the target group. In conclusion, Implementation of Poor Empowerment Program through KUBE of Kelurahan Gubukusuma Sub-district of North Tidore has not got significant result either from quantity or quality of service, either from program development and supervisor / social assistance side.

Keywords: Empowerment, Direct Assistance and Program Implementation.

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk menggali dan menganalisis bagaimana implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Kelurahan Gubukusuma Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan sebagai salah satu usaha strategis untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga dalam kelangsungan hidup, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, adapun instrument utama dalam pengumpulan data dilapangan dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan untuk mendapatkan data tambahan ditelusuri pula laporan-laporan tertulis dari Kepala Kelurahan Gubukusuma, Kelompok Usaha Bersama I Kelurahan gubukusuma dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan temuan dilapangan menunjukkan bahwa:Pertama, adanya kendala dalam pelaksanaan program seperti keterlambatan informasi oleh pihak kelurahan, informasi yang kurang akurat sehingga terjadi perbedaan penafsiran dari berbagai kelompok sasaran dan sosialisasi program yang kurang intens dan maksimal pada sistem pengembangan program. Kedua, kelompok sasaran/KUBE I mengakui bahwa mereka memiliki kekurangan pengalaman dan informasi tentang pertanian sehingga membutuhkan pendamping yang kompeten, namun pihak pemerintah (Kepala Bidang Sosial) mengatakan bahwa mereka mengalami kekurangan tenaga sumber daya aparatur dan dana monitoring sehingga sulit memberikan pendampingan yang sesuai keinginan kelompok sasaran. Kesimpulan, Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui KUBE Pertanian Kelurahan Gubukusuma Kecamatan Tidore Utara belum memperoleh hasil signifikan baik dari jumlah maupun mutu pelayanan, baik dari sisi strategi pengembangan program dan supervisor/pendamping sosial.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Bantuan Langsung dan Impelementasi Program.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang nyaris sama tua dengan usia peradaban manusia, disetiap negara atau daerah selalu saja ada kemiskinan walaupun seberapa baik dan majunya negara atau daerah tersebut, ini seolah menjadi *fatsoen* sosial bahwa di mana ada orang kaya pasti ada orang miskin.

Menurut Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara, oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejateraan Sosial bagi fakir miskin menyatakan bahwa Keluarga fakir miskin

adalah seseorang atau keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencarian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Biro Pusat Statistik menyatakan bahwa tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Selanjutnya menurut Bank Dunia, garis kemiskinan diukur berdasarkan pada pendapatan seseorang

kurang dari US\$1 per hari (<http://id.shvoong.com/socialscience/sosiologi>)

Permasalahan kemiskinan di Indonesia saat ini berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan, pemerintah mengakui bahwa angka kemiskinan mencapai 13,3% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 237,6 juta jiwa, jumlah ini tergolong tinggi karena mencapai 31,6 juta orang (Hatta Rajasa,2011).

Jumlah angka keluarga miskin secara nasional yang sangat signifikan diatas meliputi keluarga miskin didaerah, seperti salah satu di Kota Tidore Kepulauan yaitu di Kelurahan Gubukusuma Kecamatan Tidore Utara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 menyebutkan bahwa rumah tangga miskin di Kelurahan Gubukusuma Kecamatan Tidore Utara disebutkan bahwa 40 KK (200 jiwa) yang berstatus keluarga miskin.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Lembaganya di daerah yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan yang merupakan instansi teknis, pada tahun 2009 melalui program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial (P2FM-BLPS) telah memberdayakan 25 KK yang dibentuk dalam 5 kelompok KUBE (Kelompok Usaha Bersama) fakir miskin dengan bidang usahanya pertanian, peternakan, perikanan dan

home industri, kepada masing-masing kelompok KUBE pemerintah mengalokasikan dana sebesar 30 juta rupiah perkelompok untuk dijadikan sebagai modal usaha, selain itu pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan telah melatih 5 tenaga sebagai pendamping kelurahan/desa dan 1 pendamping kecamatan di Kecamatan Tidore Utara yang bertugas melakukan pendampingan pada kelompok KUBE tersebut di tingkat kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan.

Data KK Miskin Kelurahan Gubukusuma Tahun 2009

RW	Jlh Penduduk		Jlh Penduduk Miskin		Jlh Penduduk Miskin Penerima Bantuan	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
I	57	219	7	49	7	49
II	73	307	11	69	11	69
III	72	261	14	55	14	55
IV	64	225	8	27	8	27
Jml	266	1012	40	200	40	200

Untuk dapat mengoptimalkan upaya program pemberdayaan fakir miskin pemerintah terus berupaya dengan terus merevisi peraturan, model dan mekanisme penyelenggaraab pemberdayaan keluarha fakir miskin melalui kegiatan KUBE, sehingga pada tahun 2008 kementerian sosial bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening kelompok KUBE tersebut, hal ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya dimana dana bantuan disalurkan menggunakan kerja sama pihak ketiga, upaya ini bertujuan agar tidak terjadi pengurangan biaya

administrasi dan yang lebih penting kelompok dapat mengelola sendiri keuangan yang diberikan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan kelompok KUBE sebagai penerima bantuan langsung pemberdayaan sosial pemerintah menetapkan kurun waktu 2 tahun sejak diluncurkan program, pada tahun 2010 di Kelurahan Gubukusuma Kecamatan Tidore Utara angka keluarga fakir miskin mencapai 240 jiwa dengan 40 KK, (data BPS 2010), angka ini mengalami peningkatan sesudah program P2FM melalui kegiatan KUBE fakir miskin diluncurkan, artinya belum signifikan bagi upaya untuk menekan angka kemiskinan di Kelurahan Gubukusuma Kecamatan Tidore Utara.

Data KK Miskin Kel. Gubukusuma Tahun 2009 Yang Menerima Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial

RW	Jlh Penduduk		Jlh KUBE	Besar Bantuan
	KK	Jiwa		
I	7	49	1	Rp. 30.000.000
II	11	69	2	Rp. 60.000.000
III	14	55	1	Rp.30.000.000
IV	8	27	1	Rp.30.000.000
Jlh	40	200	5	Rp.150.000.000

Sumber: Data Kel. Gubukusuma Tahun 2009

Berdasarkan urain diatas ada 2 hal yang sangat fundamental dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Gubukusuma Kecamatan Tidore Utara, yaitu :

1. Belum secara menyeluruh keluarga miskin disentuh oleh program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial.
2. Angka keluarga fakir miskin terus mengalami peningkatan, sehingga walaupun program pemberdayaan fakir miskin sebagai bentuk wujud kepedulian pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terus berubah dan berkembang bersamaan dengan perubahan zaman.

Karena itu penulis beranggapan hal ini sangat penting sehingga mendorong penulis berkeinginan untuk meneliti tentang implementasi program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial di Kelurahan Gubukusuma Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Wahab (1997:21) menjelaskan konsep implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyataanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara.

Proses implementasi bermula dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran ditetapkan. Proses implementasi akan berbeda-beda sesuai dengan sifat dari kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2006:106) menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut dua karakteristik yang berbeda yaitu, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung.

2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Gunawan (1992:28), berpendapat bahwa program pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan dengan baik perlu memperhatikan hal-hal berikut : *pertama*, strategi dasar pemberdayaan masyarakat merupakan acuan diseluruh upaya pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, kerangka makro pemberdayaan masyarakat yang menurut berbagai besaran sebagai sasaran yang harus dicapai.

2.3 Kemiskinan dan penanggulangannya

Persoalan kemiskinan adalah salah satu problem yang melekat dalam masyarakat baik yang ada dikota maupun yang ada di pedesaan, kemiskinan adalah masalah pembangunan yang sangat multidimensional berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan juga ditandai dengan keterisolasi, kelatarbelakangan, dan pengangguran, kemudian meningkat menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor dan antar golongan penduduk (Gunawan, 1998:26).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, menurut Moleong (1995) bahwa penelitian deskriptif kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan responden
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola nilai yang dimiliki.

3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh yang berhubungan dengan fokus penelitian terdiri dari bentuk :

1. Data primer
2. Data sekunder

3.3 Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
3. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)
4. Observasi (Observasion)

3.4 Tekhnik Analisis Data

Tekhnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (1984) yakni analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sejak awal sampai selesaiya penelitian secara bersamaan.

IV. HASIL PENELITIAN

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasa dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun implementasi kebijakan tidak hanya sekedar merupakan mekanisme bagaimana menerjemahkan tujuan-tujuan kebijakan kepada prosedur rutin dan teknik melainkan lebih jauh dari pada itu merupakan proses

interaksi dinamik dari berbagai faktor, yang sering sulit untuk diperhitungkan terlebih dahulu. Wahab (1997:23), menjelaskan konsep implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyataanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengad-ministrasikannya maupun untuk menim-bulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Didalam implementasi program pemberdayaan fakir miskin sangat membutuhkan pola atau model implementasi yang berpengaruh pada pencapaian tujuan implementasi kebijakan tersebut, Edward III dalam Yunus Namsa (2011;54) mengemukakan bahwa ada empat faktor kritis atau variabel didalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu : komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh langsung terhadap implementasi dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya.

Salah satu Kelurahan di Kecamatan Tidore Utara yang telah menerima bantuan langsung pemberdayaan sosial adalah Kelurahan Gubukusma, sebagai kelurahan pemekaran yang diresmikan pada tanggal 29 Desember 2007 berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Tidore Kepulauan Nomor 16 Tahun 2007, dimana sebelumnya berada dibawah Kelurahan Ome dan Kelurahan Mareku yaitu lingkungan Kusumayou dan Guaepaji dibawah Kelurahan Ome dan lingkungan Bua-Bua dibawah Kelurahan Mareku, tentu segala sesuatu yang menyangkut dengan pemerintahan maupun elemen-elemen pendukung lainnya diberbagai bidang perlu secara terus-menerus dioptimalkan sehingga apa yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan pemekaran dapat direalisasikan.

Bila dilihat secara dekat kondisi obyektif yang ada di Kelurahan Gubukusuma sebenarnya kelurahan ini masih berada dalam kategori tertinggal. Kondisi keterisolasi dan ketertinggalan ini adalah akibat dari minimnya sarana dan prasana sosial dan ekonomi. Masalahnya adalah arah dan kebijakan pembangunan dimasa lalu berimplikasi terkait tidak adanya penyeragaman antara wilayah pesisir dan wilayah pelosok.

Letak Kelurahan Gubukusuma berada pada ketinggian 22 KM dari permukaan laut. Adapun batas – batas Kelurahan Gubukusuma adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Fobaharu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sirongo Folaraha
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ome

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Jaya.

• Kependudukan.

Dibidang kependudukan upaya pengendalian penduduk perlu ditingkatkan, pada tahun 2008 jumlah penduduk berkisar 997 jiwa, berdasarkan hasil sensus dan registrasi penduduk pada bulan Nopember Tahun 2009 jumlah jiwa meningkat yaitu 1012 jiwa dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 526 jiwa dan berjenis kelamin wanita sebanyak 486 jiwa. Membengaknya jumlah penduduk pada periode 10 bulan terakhir disebabkan karena pada sebagian penduduk yang menempati di Kelurahan Gubukusuma adalah penduduk pendatang atau migrasi dari pulau Halmahera dan sekitarnya.

Secara keseluruhan proporsi penduduk tidak merata antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya. Untuk penduduk yang menempati di lingkungan RW 02 dengan jumlah penduduk terbesar bila dibandingkan dengan yang menempati di lingkungan RW 01, RW 03 dan RW 04. Sedangkan pertambahan penduduk umumnya membengak pada lingkungan RW 03 hal ini disebabkan karena migrasi masuk penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan alami (*Natural Increase*)

Pada tahun 2008 jumlah penduduk meninggal sebanyak 3(tiga) orang sedangkan pada tahun 2009 jumlah mencapai 8(delapan) orang. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu meningkatkan kualitas hidup penduduk

terutama pada tingkat kondisi kesejahteraan rendah. Hal ini perlu secara terus menerus perlu ditingkatkan agar tingkat hidup anak lahir mati sudah dapat dikendalikan, ditahun 2008 jumlah anak lahir hidup sebanyak 19 orang sedangkan anak lahir mati tidak ada sedangkan ditahun 2009 jumlah anak lahir hidup sebanyak 9 orang dan anak lahir mati tidak ada.

- Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu mendapat perhatian yang sangat penting, SDM selain sebagai subjek merupakan objek pembangunan, dengan demikian pengembangan sumber daya manusia meliputi seluruh siklus hidup manusia mulai dari lahir hingga akhir hayat.

Salah satu ukuran untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yaitu adanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari waktu ke waktu. Untuk penduduk di Kelurahan Gubukusuma pengembangan angkatan kerja Tahun 2008 – 2009 sebanyak 567 orang yang tersebar pada berbagai mata pencarian, dari dan registrasi penduduk Tahun 2009 jumlah angkatan kerja terdiri atas mata pencarian petani sebanyak 457 orang, PNS sebanyak 32 orang, Pegawai Honorer 15 orang, Polri 2 orang, Nelayan 8 orang, Pensiunan 3 orang, Sopir 13 orang dan Ojek Motor 17 orang.

Sedangkan pada angka pendidikan di kualifikasikan terdiri dari yang menempuh

jenjang pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 2 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 45 orang, SMU sederajat 65 orang, SMP sederajat 53 orang, dan pendidikan dasar (SD) sebanyak 164 orang. Dan untuk kategori umur penduduk dibagi antara 0-14 tahun sebanyak 247 orang, 15-46 sebanyak 653 orang, 47-60 tahun sebanyak 83 orang, dan usia diatas 60 tahun sebanyak 29 orang, presentasi penduduk cacat terbagi atas yang mengalami tuna netra sebanyak 8 orang, cacat fisik sebanyak 13 orang, dan cacat mental 4 orang.

- Keagamaan

Kehidupan keberagaman di Kelurahan Gubukusuma berkembang dengan baik sejalan dengan kehidupan budayanya. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat di Kelurahan Gubukusuma memiliki tempat-tempat ibadah yang permanen, membaiknya kesadaran beragama maupun toleransi antar umat beragama yang tinggi. Disamping itu tumbuhnya kesadaran yang cukup kuat dikalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membangun rasa kebersamaan antar sesama umat beragama.

Walaupun demikian, peggayatan ajaran agama masih sebatas pada norma-norma dan tata cara ritual pengabdian kepada sang pencipta sedangkan bagaimana agama yang menjadi sumber inspirasi bagi etos kerja penghargaan pada prestasi dan dorongan untuk mencapai kemajuan dirasakan belum banyak terjadi. Oleh karena itu dalam kurun waktu

lima belas tahun kedepan fungsi sosial ajaran agama harus mampu menggerakan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.

- Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat dapat diketahui melalui peningkatan umur harapan hidup karena dengan adanya peningkatan umur harapan hidup mengidentifikasi adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat pada khususnya dan hidup pada umumnya.

Kondisi kesehatan masyarakat saat ini diperburuk dengan adanya disparitas yang cukup lebar. Masalah kesehatan masyarakat masih berkaitan dengan berbagai penyakit seperti infeksi akibat lingkungan fisik dan prilaku tidak sehat. Kondisi ini tercermin dengan tingginya penyakit malaria, ispa dan diare. Disamping itu penyakit menular lainnya yang terus meningkat dari waktu ke waktu selain itu meningkatnya penderita penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, hipertensi dan lain-lain sebagainya.

- Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Gubukusuma masih jauh dari harapan hal ini dapat ditunjukan dengan masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera, oleh karena itu upaya yang setiap saat selalu diprioritaskan selain pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, juga dibidang sosial terutama bagi masyarakat marginal termasuk penyandang masalah sosial.

Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat disini yaitu keberpihakan, kepedulian, kepercayaan dan kebersamaan untuk mandiri dan mampu menciptakan masa depan yang lebih baik dengan menganut prinsip “dari kita oleh kita dan untuk kita” ketersediaan masyarakat menjadi bagian dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau berusaha secara swadaya diberbagai bidang sehingga menjadi bukti dari keinginan masyarakat untuk terlibat dari proses pembangunan.

Berperannya lembaga-lembaga masyarakat adat dan agama, berkembangnya usaha ekonomi produktif oleh masyarakat, penerapan teknologi tepat guna dalam memperoleh potensi desa dan menguatkan lembaga-lembaganya. Namun demikian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat masih mengalami kendala dikarenakan faktor sosial budaya masyarakat, kondisi geografis dan infrastruktur yang belum memadai, selain itu ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan sektor swasta masih tinggi.

- Ekonomi

Indikator agregat ekonomi makro yang lazim digunakan untuk mengukur tingginya perekonomian yaitu produk domestik bruto (PDB), dan untuk mengukur kemajuan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan dapat dilihat dari tingkatan kemakmuran ekonomi masyarakat yaitu meliputi indikator pendapatan penduduk pertahun.

Pemberian subsidi pemerintah melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) dan program sejenis lainnya telah membawa perubahan yang baik bagi pendapatan penduduk sekalipun perubahan tersebut tidak menyangkut pada perubahan pola hidup secara menyeluruh, pemberian modal usaha dalam rangka perubahan ekonomi masyarakat lewat program-program peningkatan usaha kecil menengah (UKM) juga telah membuka usaha baru maupun pengembangan usaha yang telah mendorong kegiatan ekonomi masyarakat ataupun untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja meskipun masih ada kecenderungan dan dalam skala yang terkecil.

Karakteristik Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok usaha bersama merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya, aktivitas sosial ekonomi keluarga fakir miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan. Pembentukan KUBE didasari oleh kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber/keadaaan geografis, latar belakang kehidupan budaya, memiliki motivasi yang sama, keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh berkembang lama.

- Aspek KUBE

Penerimaan program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial adalah kelompok usaha bersama yang dikategorikan berkembang yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Bidang kelembagaan
2. Bidang sosial
3. Bidang ekonomi

- Struktur dan kepengurusan KUBE

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan. Dengan struktur dapat diketahui “ siapa mengerjakan apa”, “siapa berkewajiban dan bertanggung jawab apa”.

Struktur KUBE sangat tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE tersebut. Tidak ada suatu struktur yang baku tentang struktur KUBE, strukturnya diserahkan pada kelompok KUBE.

- Pengelolaan jenis usaha

1. Untuk mendorong dan menjamin keberlangsungan kegiatan KUBE, maka setiap KUBE dan mengembangkan satu atau beberapa jenis usaha sosial ekonomi produktif (UEP) yang sesuai dengan minat, potensi dan sumber daya yang ada dilingkungannya.
2. Pengelolaan jenis usaha yang dikembangkan oleh KUBE sepenuhnya diserahkan kepada kelompok KUBE tersebut.

3. Untuk pengembangan jenis usaha kelompok KUBE dapat bekerja sama dengan pengusaha atau instansi terkait.
 4. Bila jenis usaha sudah beragam, pengelolaan jenis usaha dapat diserahkan kepada satu orang atau beberapa orang yang dianggap mampu dan mempunyai keterampilan atau sifat dari jenis usaha tersebut, namun pembinaan dan manajemen usaha tetap berada dalam KUBE.
- Mekanisme penyaluran dana bantuan Dana APBD Kementerian Sosial (DIPA Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin) yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan P2FM BLPS pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu :
 1. Bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS), adalah dana stimulan UEP yang disalurkan secara langsung kepada KUBE melalui rekening di BRI.
 2. Biaya operasional pemantauan dan pengendalian (BOPP), digunakan untuk mendukung kegiatan operasional P2FM BLPS, seperti administrasi dan koordinasi, pelatihan pendamping, pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan dan penyampaian laporan.

Penyaluran dana P2FM BLPS yang bersifat hibah bersyarat dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu melalui proses administrasi keuangan di kementerian sosial maupun kementerian keuangan. Adapun untuk dana P2FM BLPS yang bersifat biaya operasional pemantauan fakir miskin dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

- Pemanfaatan dana
 1. Dana stimulan UEP P2FM BLPS hanya diperkenaankan dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan produktifitas yang dijalankan oleh KUBE.
 2. Pembelian atau pemanfaatan dana stimulan UEP oleh KUBE, harus sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya.
 3. Contoh pemanfaatan dana KUBE diantaranya adalah untuk membeli peralatan utama maupun penunjang.
 4. Jika ada perubahan penggunaan dana stimulan UEP yang telah dicairkan maka semua anggota harus melakukan musyawarah kembali.

5. Usaha yang dilakukan KUBE adalah : usaha tani palawija, usaha tani sayuran.

Rincian penerimaan bantuan tiap-tiap KUBE Kelurahan Gubukusma.

Kebutuhan	Banyak /Volum e	Harga
Benih	1 paket	Rp. 13.225.000
Pupuk	1 paket	Rp. 10.750.000
Pestisida	1 paket	Rp.4.250.000
Peralatan	1 paket	Rp. 1.775.000

Sumber data : Ketua KUBE 1

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL DI KELURAHAN GUBUKUSMA KECAMATAN TIDORE UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN

Program pemberdayaan fakir miskin melalui mekanisme bantuan langsung pemberdayaan sosial (P2FM-BLPS) merupakan suatu program penguatan modal usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBE) produktif. Ketika hal ini ditanyakan kepada Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan M. Saleh Maradjabessy, menjelaskan bahwa :

“Kementerian Sosial sebagai bagian dari lembaga yang berfokus pada program pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin, salah satu program yang dilaksanakan adalah P2FM-BLPS dengan

pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian modal usaha yang disalurkan melalui perbankan (BRI), salah satu kelurahan di Kota Tidore Kepulauan yang telah menerima bantuan ini adalah Kelompok Usaha Bersama yang berada di Kelurahan Gubukusma”

Hal ini ketika dikonfirmasi kepada Lurah Gubukusma Muhammad Djamilu menyatakan bahwa :

“pihak kami merasa bersyukur dengan kehadiran program ini, karena ternyata usulan melalui MUSREMBANG untuk pelaksanaan program P2FM-BLPS di kelurahan ini dapat terrealisasi, program pemberdayaan fakir miskin melalui mekanisme bantuan langsung pemberdayaan sosial kepada kelompok usaha bersama (KUBE) telah dilaksanakan di Kelurahan Gubukusma, hal ini terbukti dengan telah disalurkannya bantuan langsung pemberdayaan sosial kepada 5 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan total bantuan sebesar Rp.150.000.000 yang masing-masing kelompok memperoleh dana sebesar Rp.30.000.000”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Samsul Taher, ketua KUBE I Kelurahan Gubukusma bahwa :

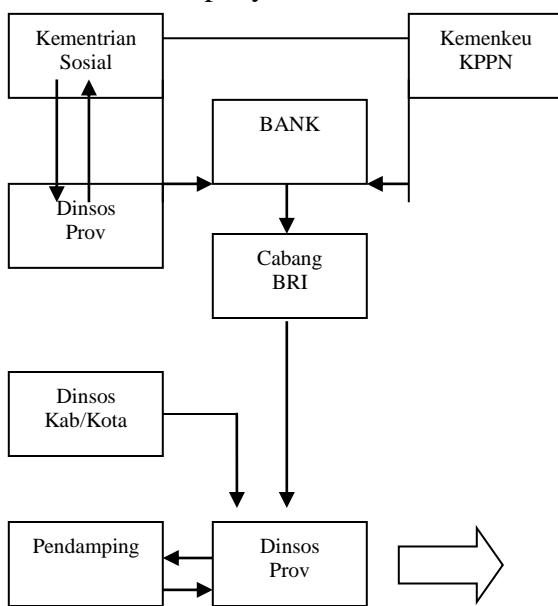
“Program P2FM-BLPS yang diusulkan oleh masyarakat diterima oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dan telah disalurkan kepada Kelompok Usaha Bersama”

Ketika hal ini ditanyakan kepada M. Saleh Maradjebessy, (Kepala Bidang Sosial) menjelaskan bahwa :

“Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Gubukusuma sebanyak 5 KUBE telah menerima bantuan langsung pemberdayaan sosial sebesar Rp.30.000.000 – setiap kelompok dengan total untuk Kelurahan Gubukusuma sebesar Rp.150.000.000 – untuk 5 KUBE. Penetapan KUBE Kelurahan Gubukusuma sebagai penerima bantuan memenuhi standar dan kriteria setalah dilakukan verifikasi dan ditemukan kelompok yang sangat rentan untuk ditangani maka itu yang didahuluikan disusulkan maupun tidak disusulkan, mengingat kami dinas sosial memiliki data dimaksud”

Mekanisme penyaluran P2FM-BLPS



Lebih lanjut dijelaskan M. Saleh Maradjabessy terkait strategi untuk pengembangan program P2FM-BLPS menjelaskan bahwa :

“Program Pemberdayaan Sosial Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (P2FM-BLPS) pada tahun 2010 memiliki beberapa strategi yaitu : *pertama*, terkait partisipasi sosial, yang mengandung makna keterlibatan seluruh anggota KUBE dan masyarakat sekitarnya dalam setiap proses pemberdayaan fakir miskin, partisipasi sosial dilakukan dengan menyediakan informasi program, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap permasalahan kemiskinan. *Kedua*, advokasi sosial, mengandung makna adanya upaya memberikan pendampingan sosial, perlindungan sosial terhadap KUBE fakir miskin, sehingga mereka memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. *Ketiga*, pengembangan budaya kewirausahaan mengandung makna tumbuh dan berkembangnya sikap mental KUBE fakir miskin untuk mau belajar dan melakukan usaha ekonomi produktif berdasarkan potensi dan kreativitas yang dimiliki. *Keempat*, pengembangan budaya menabung mengandung makna tumbuhnya pengertian, sikap mental dan kebiasaan KUBE fakir miskin untuk menyisihkan dan menyimpan sebagian dari pendapatannya

untuk kebutuhan peningkatan kualitas, atau menjamin terpeliharanya kesejahteraan sosialnya dimasa depan. *Kelima*, kemitraan sosial mengandung makna terjalannya kerja sama dengan berbagai pihak (dunia usaha, LSM/orsos, perguruan tinggi, kalangan perbankan dan masyarakat umum) dalam upaya pengembangan KUBE secara berkelanjutan”.

Lebih lanjut dikatakan M. Saleh Maradjabessy bahwa Program P2FM-BLPS yang dilaksanakan bertujuan sebagai berikut : “tujuan program ini 5 yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin, mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin, meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah masalah kemiskinan, meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin”.

Kehadiran KUBE fakir miskin merupakan media untuk meningkatkan motivasi warga untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal. Melalui KUBE juga

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan berfikir para anggota karena mereka dituntut suatu kemampuan manajerial untuk mengelolah usaha yang sedang dijalankan, dan berupaya menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan untuk keberhasilan kelompoknya. Selain itu diharapkan dapat menumbuhkembangkan sikap-sikap berorganisasi dan pengendalian emosi yang semakin baik serta dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial baik diantara keluarga binaan sosial maupun kepada masyarakat secara luas. Namun kenyataannya implementasi program pemberdayaan fakir miskin melalui mekanisme bantuan langsung pemberdayaan sosial ini belum maksimal mencapai sasaran dan tujuan seperti yang diharapkan, terbukti dengan belum maksimalnya usaha ekonomi produktif (UEP) yang dikembangkan oleh kelompok usaha bersama (KUBE) dalam mendorong kemandirian masyarakat, sehingga bantuan yang dilakukan hanya mampu bertahan semusim saja, terbukti setalah pasca panen masyarakat kemudian masing-masing beralih melakukan usaha lain. Permasalahan ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kelompok usaha bersama (KUBE) saja, tetapi perlu adanya kordinasi instansi teknis pelaksana, yakni Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan dengan KUBE, baik dari aspek administrasi, manajerial maupun aspek teknis seperti peningkatan peran pendamping dan supervisor, memaksimalkan pengelolaan, pengembangan dan kualifikasi pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) serta keterlibatan instansi terkait (dunia usaha) dalam rangka peningkatan penganggaran.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan publik, sebagai berikut : *pertama*, jumlah perubahan yang akan dihasilkan; dan *kedua*, jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Menurut Wahab (1997:79).

Jadi suatu implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program dilapangan relatif tinggi.

Sementara itu implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan), kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasa dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun implementasi kebijakan tidak hanya sekedar merupakan mekanisme bagaimana menerjemahkan tujuan-tujuan kebijakan kepada prosedur rutin dan teknik melainkan lebih jauh dari itu merupakan proses interaksi dinamik dari berbagai faktor, yang sering sulit untuk diperhitungkan terlebih dahulu.

- Sistem supervisi dan pendamping sosial

Supervisi dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kab/Kota yang membidangi kegiatan program pemberdayaan fakir miskin dan mendapat penugasan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi, sementara pendampingan sosial dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan sampai desa/kelurahan.

Hal senada juga diakui oleh Lurah Gubukusuma, Muhammad Djamilu, menjelaskan bahwa :

“terkait informasi program P2FM-BLPS dan hubungannya dengan usaha ekonomi produktif, baik dari pemerintah kelurahan maupun pihak terkait terutama Kelompok Usaha Bersama sangat membutuhkan kehadiran supervisor dan pendamping sosial, kami sering mendapat pertanyaan dari

masyarakat terutama terkait program ini, namun ada hal-hal tertentu yang tidak kami jelaskan”.

Tujuan supervisi untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kemampuan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan pedoman, sedangkan pendampingan sosial secara spesifik memiliki tujuan adalah meningkatkan semangat dan motivasi anggota KUBE untuk bekerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan, serta mampu menabung. Meningkatkan kemampuan KUBE yang didampingi menemukan permasalahan dan potensi sumber daya sosial dan ekonomi yang ada didalam diri dan lingkungannya. Meningkatkan kemampuan KUBE dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi UEP, termasuk dalam penyusunan proposal pengembangan usaha, meningkatkan kemampuan KUBE dalam mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana bantuan untuk UEP dengan membuat pembukuan sederhana, meningkatkan akses KUBE kepada lembaga keuangan, instansi terkait dan dunia usaha yang berhubungan dengan pengelolaan UEP.

Didalam pendampingan sosial terdapat berbagai unsur-unsur yang terlibat dan unsur-unsur tersebut saling berinteraksi sebagai suatu sistem sosial yang utuh dan komprehensif, unsur-unsur tersebut antara lain : tokoh lokal, kelompok swadaya, masyarakat, dana

masyarakat, sarana dan prasarana yang tersedia, pengetahuan dan kearifan lokal, teknologi tepat guna, dan mitra usaha baik nasional maupun lokal, dalam pelaksanaan tugas pendampingan sosial pendamping sosial senantiasa berinteraksi dan bermitra kerja (*partnership*) dengan berbagai pihak seperti : TKSM, orsos, konsultan teknis, lembaga sosial kemasyarakatan yaitu : organisasi non pemerintah/organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain itu dalam kegiatan pendampingan untuk mencapai sasaran tujuan yang diinginkan, ada banyak hal yang menjadi hambatan dan kendala antara lain :

- a. Sumber daya manusia yang ada pada dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kota tidore kepulauan sangat rendah dan terbatas tenaganya, hal ini berakibat pada tidak berimbangnya antara pendamping dan angka kemiskinan yang terus meningkat.
- b. Tingginya tingkat kecemburuhan sosial, keterbatasan dana yang berdampak pada tidak terakomodirnya semua keluarga fakir miskin dalam kegiatan pemberdayaan menimbulkan munculnya presepsi dan pandangan yang bervariatif kepada pemerintah kelurahan sehingga terjadinya penurunan partisipasi masyarakat

- dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan itu sendiri.
- c. Kemampuan anggota kelompok dalam mengelola administrasi baik administrasi umum maupun keuangan sangat rendah sehingga pengurus kesulitan melakukan pertanggung jawaban, hal ini membuat terjadi krisis kepercayaan anggota terhadap pengurus.
- d. Pihak kecamatan tidak diberikan kewenangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program ini, sehingga pada aspek evaluasi dan monitoring sulit dilakukan oleh pihak kecamatan, selain itu pada tingkat kecamatan belum dibentuk UPTD dinas sosial yang bertugas memantau, membina dan mendampingi kegiatan dimaksud.
- Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Gunawan (1999:28) berpendapat bahwa program pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan dengan baik perlu memperhatikan hal-hal berikut : *pertama*, strategi dasar pemberdayaan masyarakat merupakan acuan diseluruh upaya pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, kerangka makro pemberdayaan masyarakat yang menurut berbagai besaran sebagai sasaran yang harus dicapai. Sedangkan strategi kebijaksanaan yang secara langsung

yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif. (Wahab, 1997:80).

Menurut Pranaka (1992:2), bentuk pemberdayaan masyarakat melalui tiga proses pentahapan yaitu :

1. Tahap inisial : dari pemerintah oleh pemerintah dan untuk rakyat.
2. Tahap partisipatoris: dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat.
3. Tahap emansipatif : dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat antara lain : penciptaan kondisi yang memungkinkan kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, persedian sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Ketiga, strategi kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran yang mendukung kebutuhan dasar berupa pangan, sandang perumahan, kesehatan, pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan khususnya masyarakat miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Strategi dalam kebijaksanaan ini diarahkan untuk mendorong dan memperlancar proses transmisi dan kehidupan subsistem mengenai kehidupan pasar (Gunawan, 1999:34).

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya implementasi program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial di Kelurahan Gubukusma Kecamatan Tidore Utara belum memperoleh hasil yang signifikan baik dari jumlah maupun mutu pelayanan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta: Bandung.
- Dewantoro, Awan. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Aditya Media Jogjakarta.
- Hoogerwerf, A. 1993. *Ilmu Pemerintahan*. Terjemahan Erlangga: Jakarta.
- Milles dan Huberman. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Gunung Agung: Jakarta.
- Wahab, S. A. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.*
- Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan.*